



PKL Lansia Jadi Sasaran

Pedagang Teras Malioboro Adukan Tindakan Represif Diduga dari Petugas UPT

YOGYA, TRIBUN - Puluhan pedagang Teras Malioboro 2 menyambangi Kantor DPRD Kota Yogyakarta, pada Selasa (17/9) siang. Perwakilan pedagang mengadukan tindakan represif yang diduga dilakukan oleh petugas UPT Pengelola Kawasan Cagar Budaya Kota Yogya.

Pertemuan antara perwakilan pedagang Teras Malioboro 2 dengan legislatif pun berlangsung cukup panjang, lebih kurang sekitar 1 jam. Dalam kesempatan tersebut, perwakilan pedagang pun ditemui langsung oleh Ketua Sementara DPRD Kota Yogya, Wisnu Sabdono Putro.

Selapas pertemuan, Ketua Paguyuban Tri Dharma, Stpriyati, mengatakan, pihaknya secara khusus hendak mengadukan tindakan represif yang diduga dilakukan petugas UPT Pengelola Kawasan Cagar Budaya. Tindakan tersebut, lanjutnya, diduga untuk memaksa atau menekan pedagang supaya menyetujui, serta menandatangani persetujuan relokasi.

"Jadi, mendatangi rumah-rumah anggota, tiga-empat orang petugas mendatangi, untuk minta tanda tangan persetujuan relokasi, kalau tidak tanda tangan, tidak mengumpulkan berkas ke UPT, nanti lapaknya hilang," katanya.

Ia menyampaikan, rata-rata tindakan represif itu dilakukan petugas dengan menyasar pedagang Teras Malioboro 2 yang berusia lanjut (lansia). Dalam menjalankan aksinya, kata Upi, mereka pun tidak ragu membuka jati dirinya sebagai bagian dari UPT Pengelola Kawasan Cagar Budaya.

"Itu dari dulu sampai sekarang masih sembunyi-sembunyi dilakukan, kami memiliki bukti-bukti. Mereka menyatakan (dari UPT) juga, dan ada yang memakai seragam juga," jelasnya.

KISRUH RELOKASI

- Puluhan pedagang Teras Malioboro 2 menyambangi Kantor DPRD Kota Yogyakarta, pada Selasa (17/9) siang.
- Perwakilan pedagang mengadukan tindakan represif yang diduga dilakukan petugas UPT Pengelola Kawasan Cagar Budaya Kota Yogya.
- Petugas disebut memaksa atau menekan pedagang supaya menyetujui, serta menandatangani persetujuan relokasi.
- UPT Pengelola Kawasan Cagar Budaya Kota Yogya, menepis pernyataan pedagang.

Dijumpai terpisah, Ketua Sementara DPRD Kota Yogya, Wisnu Sabdono Putro, menegaskan siap menampung seluruh aduan dari pedagang Teras Malioboro 2. Politikus PDIP itu pun bakal menindaklanjutinya dengan mengonfirmasi pihak-pihak terkait yang diduga terlibat dalam aktivitas tersebut.

"Tadi audiensi dari PKL, dari Paguyuban Tri Dharma, terkait dengan tindakan, represif dari pihak pemerintah kota. Nah, ini akan kita sampaikan ke pemerintah kota supaya tidak melakukan hal-hal itu," jelasnya.

Menepis

UPT Pengelola Kawasan Cagar Budaya Kota Yogya, menepis pernyataan Paguyuban Tri Dharma, yang menuding petugasnya melakukan tindakan represif pada pedagang Teras Malioboro 2.

Kepala UPT Pengelola Kawasan Cagar Budaya Kota Yogyakarta, Ekwanto, mengatakan, pihaknya sama sekali tidak melakukan tindakan represif. Dijelaskan, petugasnya sengaja mendatangi beberapa rumah pedagang Teras Malioboro 2 karena yang bersangkutan tidak bisa dijumpai di lokasi.

Padahal, selaras aturan yang berlaku, penyewa atau karyawan tidak berhak untuk menandatangani kontrak maupun validasi untuk persetujuan relokasi. "Kalau kami mengantar suratnya ke teras

dan hanya ketemu sama karyawan dan pengontrak, pasti tidak sampai ke ownernya," tegasnya, Selasa (17/9).

"Ketika ada yang sakit dan sebagainya, itu kami beri tugas ke teman-teman, untuk tanda tangan di sana langsung. Misalnya, ada yang stroke, nggak mungkin ke sana (Teras Malioboro 2), ini untuk memudahkan sebenarnya," tambah Ekwanto.

Oleh sebab itu, dirinya menegaskan, tuduhan yang dilayangkan perwakilan pedagang selepas audiensi di Kantor DPRD Kota Yogyakarta itu sama sekali tidak mendasar. Sebaliknya, Ekwanto menyebutkan, ada indikasi sejumlah pedagang yang mengintimidasi rekan sejawatnya yang sudah menandatangani persetujuan relokasi.

"Itu sudah kami klarifikasi, ketika ada satu orang yang sudah tanda tangan, tapi ingin mencabut. Mencabut pernyataan setuju relokasi itu muncul dari hati paling dalam atau intervensi dari luar," paparnya.

Meski demikian, ia menegaskan, jikalau masih ada pedagang yang bersikukuh enggan menandatangani persetujuan relokasi, pihaknya pun tidak akan mememahkannya. Menurutnya, hal tersebut selaras dengan arahan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X kepada UPT Pengelola Kawasan Cagar Budaya Kota Yogya. **(aka)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005